

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
MANAJEMEN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DALAM
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA

A. Landasan Filosofis

Penelitian disertasi ini dilandasi oleh aliran filosofat konstruktivisme adalah latar belakang kajian penelitian ini tentang manajemen pembelajaran bahasa Inggris dalam meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara siswa SMP/MTs atau sederajat. Menurut strukturalisme, filsafat pengetahuan menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Suparno, 1997).

Bidang pendidikan dipengaruhi oleh konstruktivisme melalui teorinya tentang belajar dan pembelajaran. Menurut konstruktivisme, belajar dilihat seperti yang tertuang dalam kutipan berikut ini:

Learning is view as a regulatory process of struggling with the conflict between existing personal models of the world and discrepant new insight, constructing new representation and models of reality as a human meaning making venture with culturally develop tool and symbols, and further negotiating such meaning through cooperative social activity, discourse and debate (Sit et al., 2016)

Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses pengaturan untuk melawan konflik antara model – model pribadi yang ada di dunia dan wawasan baru yang tidak sesuai, membangun representasi dan model realita baru sebagai usaha pemaknaan manusia dengan alat dan symbol yang dikembangkan secara budaya, dan selanjutnya menegosiasikan makna tersebut melalui kerjasama. Aktifitas social, perselisihan dan perdebatan (*translation*).

Konstruktivisme belajar didefinisikan sebagai mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas refleksi, kolaborasi, dan interpretasi. Jenis aktivitas ini memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang berbeda tentang materi berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan perspektif yang mereka gunakan untuk menginterpretasikannya. Pembelajaran

berarti mengatur lingkungan siswa agar proses belajar terjadi, yaitu interaksi mereka dengan lingkungan mereka.

Pengetahuan selalu membuat kenyataan melalui kegiatan kognitif, itu bukanlah gambaran dari dunia nyata. Individu membuat kategori, skema, konsep dan struktur pengetahuan yang diperlukan. Oleh karena itu, pengetahuan bukan berasal dari pengamat, tetapi dari pengalaman manusia sendiri. Menurut Piaget, ketika reorganisasi dilakukan karena pemahaman yang baru, proses pembentukan ini berjalan terus menerus (Suparno, 1997). Menurut Glasersfield, kemampuan berikut diperlukan untuk proses konstruksi:

1. Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman;
2. Kemampuan untuk membandingkan, mengambil keputusan (menjelaskan) tentang persamaan dan perbedaan;
3. Kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman tertentu daripada yang lain. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan pengalaman sangat penting karena interaksi dengan pengalaman – pengalaman membentuk pengetahuan (Komalasari, 2011).

Oleh karena itu, kemampuan untuk membandingkan sangat penting untuk klasifikasi dan membangun pengetahuan serta untuk menarik sifat yang lebih umum dari pengalaman khusus dan melihat kesamaan dan perbedaannya. Kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman tertentu daripada yang lain menyebabkan masalah nilai dari pengalaman yang kita bentuk.

Secara umum, prinsip-prinsip konstruktivisme adalah sebagai berikut:

1. pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara individu maupun sosial;
2. pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya melalui aktifitas murid sendiri untuk menalar;
3. siswa aktif mengkonstruksi, sehingga konsep-konsep terus berkembang menuju konsep-konsep yang lebih rinci, lengkap, dan sesuai dengan teori ilmiah;
4. guru hanya membantu menyediakan pengetahuan dasar kepada murid-murid mereka.

Selain itu, menurut pembelajaran konstruktivistik, siswa harus terus mempelajari hal-hal baru yang bertentangan dengan aturan lama dan mengubah

aturan jika tidak sesuai lagi. Untuk mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar, adalah perlu bahwa:

1. lingkungan belajar harus demokratis;
2. kegiatan belajar harus interaktif dan berpusat pada siswa; dan
3. guru harus mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas kegiatan belajar mereka sendiri (Danarjati et al., 2014).

Konstruktivisme belajar didefinisikan sebagai mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas refleksi, kolaborasi, dan interpretasi. Jenis aktivitas ini memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang berbeda tentang materi berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan perspektif yang mereka gunakan untuk menginterpretasikannya. Pembelajaran berarti mengatur lingkungan siswa agar proses belajar terjadi, yaitu interaksi mereka dengan lingkungan mereka.

Peneliti menggunakan aliran konstruktivisme sebagai landasan filosofis dalam penelitian ini. Seperti diketahui bahwa aliran ini berpusat pada peserta didik untuk membangun atau mengkonstruksi nilai-nilai belajar dari dirinya sendiri. Keberadaan guru hanya sebagai fasilitator. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing tentu aktivitas ini merupakan sebuah sistem yang harus dibentuk secara konstruktif. Hal ini dilakukan sebagai aksi nyata (*real*) di lapangan untuk mendapatkan pengetahuan baru sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan dunia.

Landasan filsafat yang digunakan merupakan dasar pijakan dari pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris pada satuan pendidikan di Indonesia. Menurut Sardiman (2007:37) mengemukakan bahwa, “konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri”. Sejalan dengan pendapat ini menurut Abimanyu (2008) bahwa, “Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula”

Terkait pandangan konstruktivisme dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris dapat berhasil apabila dilakukan dengan menerapkan manajemen dan rancangan (*design*) yang benar dan tepat dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Filsafat sebagai landasan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris diharapkan mampu membawa keberhasilan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berbicara (*speaking skill*).

Landasan filosofis memiliki dua kata yaitu “Landasan” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Konstruktivisme belajar didefinisikan sebagai mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas refleksi, kolaborasi, dan interpretasi. Jenis aktivitas ini memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang berbeda tentang materi berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan perspektif yang mereka gunakan untuk menginterpretasikannya. Pembelajaran berarti mengatur lingkungan siswa agar proses belajar terjadi, yaitu interaksi mereka dengan lingkungan mereka.

Landasan filosofis pendidikan sebagai mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas refleksi, kolaborasi, dan interpretasi. Jenis aktivitas ini memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang berbeda tentang materi berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan perspektif yang mereka gunakan untuk menginterpretasikannya. Pembelajaran berarti mengatur lingkungan siswa agar proses belajar terjadi, yaitu interaksi mereka dengan lingkungan mereka. Konstruktivisme dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris dapat berhasil apabila dilakukan dengan menerapkan manajemen dan rancangan (*design*) yang benar dan tepat dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Filsafat sebagai landasan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris diharapkan mampu membawa keberhasilan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan.

Sedangkan menurut Ornstein, A.C, dkk (2011:39), menyebutkannya Terkait pandangan konstruktivisme dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris dapat berhasil apabila dilakukan dengan menerapkan manajemen dan rancangan (*design*) yang benar dan tepat dalam rangka untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Filsafat sebagai landasan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris diharapkan mampu membawa keberhasilan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berbicara.

Menurut Sikun Pribadi dalam Yusuf (2010:45) mengartikan filsafat sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Konstruktivisme belajar didefinisikan sebagai mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas refleksi, kolaborasi, dan interpretasi. Jenis aktivitas ini memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang berbeda tentang materi berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan perspektif yang mereka gunakan untuk menginterpretasikannya. Pembelajaran berarti mengatur lingkungan siswa agar proses belajar terjadi, yaitu interaksi mereka dengan lingkungan. Landasan filsafat ini juga merupakan upaya dalam melihat pelaksana pendidikan dan peserta didik sebagai seorang manusia utuh. Pengelolaan proses pembelajaran bahasa Inggris harus mengakomodir peran manusia secara utuh. Menurut Viktor E. Frankl dalam Yusuf, (2010) mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris dapat berhasil apabila dilakukan dengan menerapkan manajemen dan rancangan (*design*) yang benar dan tepat dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Filsafat sebagai landasan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris diharapkan mampu membawa keberhasilan peserta didik dalam.

B. Landasan Sistem Nilai

Ada enam sistem nilai melandasi penelitian disertasi ini, sebagaimana Sanusi (2015:35) menjelaskan: “enam sistem nilai kehidupan yaitu nilai teologis, nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai fisik-fisiologis, dengan nilai teleologis”.

1. Nilai Teologis

Nilai Teologis mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan berpusat pada keyakinan kepada Allah SWT, sebagaimana terkandung pada ajaran Islam mencakup iman, Islam, dengan ihsan.

Iman mencerminkan keyakinan kepada:

- a. Keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan beserta sifat-sifat-Nya.
- b. Keberadaan malaikat-malaikat Allah.
- c. Kitab-kitab suci diturunkan perlu Allah.
- d. Para nabi dengan rasul sebagai utusan Allah.
- e. Kepastian adanya hari kiamat.
- f. Ketentuan takdir (qada dengan qadar) baik maupun buruk.

Islam, sebagai praktik keimanan, memiliki lima rukun utama:

- a. Mengucapkan syahadat sebagai bentuk pengakuan akan keesaan Allah dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW.
- b. Melaksanakan salat lima waktu.
- c. Menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial.
- d. Berpuasa di bulan Ramadan.
- e. Menunaikan ibadah haji bagi mampu.

Ihsan memiliki dua dimensi utama, yaitu:

- a. Hubungan dengan Allah, yaitu beribadah seolah-olah melihat-Nya, atau meyakini bahwa Allah selalu mengawasi.
- b. Hubungan dengan sesama makhluk, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dengan lingkungan sekitar.

Nilai teologis sudah tertanam pada diri manusia bahkan sebelum mereka diciptakan secara fisik, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-A'raf: 172 menegaskan bahwa setiap manusia telah bersaksi atas keesaan-Nya di alam ruh.

Ketika nilai teologis diterapkan pada kehidupan, ia memberikan ketenangan jiwa dengan raga bagi pemeluknya. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mampu menjadi dasar pada membentuk pola pikir dengan perilaku seorang Muslim berlandaskan kebenaran dengan hukum Islam. Proses pembelajaran bahasa Inggris pada perspektif teologis merupakan bentuk ikhtiar pada mengelola madrasah secara terencana dengan sistematis, guna menciptakan lingkungan pendidikan bercirikan

Islam mampu melahirkan generasi berprestasi dengan meningkatkan kinerja madrasah selaras dengan ajaran-Nya.

2. Nilai Logik

Proses pembelajaran bahasa Inggris mampu dikategorikan sebagai nilai logik, berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dengan mengingat. Nilai ini menjadi dasar pada bertindak dengan mengambil keputusan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berulang kali menyeru manusia menggunakan akalanya, seperti pada QS. Ali Imran: 190, menegaskan bahwa penciptaan alam semesta merupakan tanda bagi orang-orang berpikir.

Allah juga berfirman pada QS. An-Nahl: 67, menunjukkan bahwa pemanfaatan akal mampu membantu manusia membedakan antara bermanfaat dengan merugikan.

Berpikir secara logis harus terus berkembang identik dengan usia dengan tingkat kematangan seseorang. Jika bayi menggunakan naluri, anak-anak berpikir secara imitatif (meniru), maka orang dewasa harus mampu berpikir kreatif dengan inovatif, serta menghindari pola pikir egois. Dalam dunia pendidikan, nilai logik ini harus terus diterapkan perlu pemerintah maupun tenaga pendidik agar pengambilan keputusan pada sistem pendidikan selalu berbasis rasionalitas dengan manfaat.

Akal juga berperan pada membedakan antara benar dengan batil, serta memperkuat keimanan seseorang. Dalam QS. Ali Imran: 7, Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang berakal mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Nya.

Dalam Islam, akal memiliki kedudukan tinggi dengan sering dimanfaatkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta pengajaran agama. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa Islam agama rasional mengedepankan pemikiran logis dengan argumentasi. Namun, pada pemikiran Islam, akal tetap berada di bawah wahyu. Akal digunakan memahami wahyu, bukan menentangnya. Oleh karena itu,

pada Islam tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu, melainkan keduanya saling melengkapi pada menjelaskan kebenaran.

3. Nilai Fisik/Fisiologi

Nilai fisiologis berkaitan dengan pemanfaatan fungsi fisik pada kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tubuh manusia merupakan ciptaan Allah memiliki manfaat besar, namun sering kali potensi ini tidak dimaksimalkan. Hal ini menyebabkan umat Islam tertinggal pada bidang sains dengan teknologi. Al-Maududi, seorang pembaharu Islam, mengkritik umat Islam tidak mengoptimalkan potensi diberikan Allah, seperti pendengaran (as-sam'), penglihatan (al-bashar), dengan hati (fuad). Dalam QS. An-Nahl: 78, Allah menjelaskan bahwa ketiga anugerah ini diberikan agar manusia bersyukur dengan menggunakannya kebaikan.

Dalam perspektif pendidikan, proses pembelajaran bahasa Inggris juga didasarkan pada nilai fisiologis. Islam mengajarkan umatnya menjaga kesehatan dengan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Praktik seperti berwudhu, mandi janabah, serta penggunaan air pada bersuci menunjukkan bahwa Islam menekankan kebersihan fisik. Selain itu, ibadah puasa juga memberikan manfaat kesehatan dengan memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan, bekerja tanpa henti selama 11 bulan. Dengan menerapkan gaya hidup sehat identik ajaran Islam, umat Muslim mampu lebih optimal pada menjalankan perannya, termasuk pada dunia pendidikan.

Dengan demikian, penerapan proses pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya melibatkan aspek spiritual dengan intelektual, tetapi juga aspek fisik, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan seimbang, sehat, dengan berkualitas.

4. Nilai Etik

Nilai etik mencakup sikap hormat, mampu dipercaya, serta keadilan, semuanya berhubungan erat dengan akhlak seseorang. Namun, pada realitas kehidupan saat ini, nilai-nilai tersebut sering kali terabaikan, baik perlu individu kurang berpendidikan maupun mereka memiliki latar

belakang akademik tinggi. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan penting, sebagaimana ditegaskan pada Al-Qur'an bahwa Rasulullah suri teladan terbaik bagi umat manusia:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dengan (kedatangan) hari kiamat dengan Dia banyak menyebut Allah" (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan pada hadis bahwa beliau diutus menyempurnakan akhlak manusia:

"Saya diutus menyempurnakan budi pekerti (akhlak)." (Hadis Nabi)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jika tidak diiringi perlu nilai-nilai etika, maka kemajuan tersebut justru mampu menjadi ancaman bagi umat manusia. Hal ini terlihat pada berbagai kasus seperti peperangan dengan eksploitasi lingkungan akibat pemanfaatan ilmu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam konteks pendidikan, proses pembelajaran bahasa Inggris menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu mengelola lembaga pendidikan secara efektif. Proses pembelajaran bahasa Inggris melalui prinsip-prinsip manajemen baik dengan berbasis nilai-nilai etika.

5. Nilai Estetika pada Pendidikan

Nilai estetika berkaitan dengan keindahan, keseimbangan, dengan keharmonisan, baik pada hubungan sosial maupun pada lingkungan sekitar. Allah menciptakan alam dengan segala keindahannya tidak hanya dimanfaatkan tetapi juga agar manusia mampu merasakan keteraturan dengan keseimbangan di dalamnya. Kasih sayang dengan keindahan merupakan bagian dari fitrah manusia dianugerahkan perlu Allah SWT, sebagaimana disebutkan pada Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dengan merasa tenteram kepadanya, dengan dijadikan-Nya di

antaramu rasa kasih dengan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir." (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Dalam upaya meningkatkan kinerja madrasah melalui proses pembelajaran bahasa Inggris, aspek estetika berperan penting, terutama pada gaya kepemimpinan kepala madrasah dengan metode pembelajaran digunakan perlu para guru. Seorang pemimpin pendidikan perlu mencontoh seni kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan kelembutan pada berkomunikasi, berbicara dengan intonasi baik, serta membangun hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dengan bermusyawaratlah dengan mereka pada urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali Imran: 159)

6. Nilai Teleologi pada Pendidikan

Nilai teleologi berorientasi pada manfaat, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dengan akuntabilitas pada setiap aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu diperintahkan atau dilarang memiliki hikmah dengan manfaat bagi manusia serta lingkungannya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dengan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dengan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'."* (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Rasulullah SAW juga bersabda: *"Sebaik-baik kamu orang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (Hadis Nabi)

Dalam pandangan materialisme, alam dianggap tidak memiliki sasaran tertentu karena diyakini ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Teori evolusi, misalnya, menganggap bahwa kehidupan berlangsung sebagai hasil seleksi alam. Namun, pada Islam, setiap ciptaan Allah memiliki sasaran telah ditetapkan-Nya. Seluruh unsur di alam semesta, mulai dari mikroorganisme hingga makhluk besar seperti paus dengan gajah, saling bergantung menciptakan keseimbangan ekosistem sempurna.

Konsep teleologi ini juga relevan pada konteks pendidikan, terutama pada proses pembelajaran bahasa Inggris bertujuan agar sistem pendidikan berjalan secara efisien, produktif, dengan memberikan manfaat lebih baik bagi peserta didik serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, MBM menjadi salah satu ikhtiar pada mewujudkan cita-cita pendidikan lebih maju dengan identik dengan kebijakan berlaku di Indonesia.

C. Landasan Teori

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu tahap melibatkan pengelolaan, pengaturan, dengan pemanfaatan sumber daya pada suatu organisasi. George R. Terry (1972:4) menyatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian tahap mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengendalian, dilakukan menentukan serta mencapai sasaran telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

Griffin (2013) menambahkan bahwa manajemen mencakup serangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dengan pengendalian diarahkan pada sumber daya organisasi—baik manusia, finansial, fisik, maupun informasi—guna mencapai sasaran secara efisien dengan efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara optimal guna mencapai sasaran

tertentu. Dalam praktiknya, konsep manajemen sering dikaitkan dengan administrasi. E. Mulyasa (2007:19) menjelaskan bahwa terdapat tiga pandangan terkait hubungan antara manajemen dengan administrasi. Pertama, administrasi dianggap lebih luas daripada manajemen, di mana manajemen merupakan inti dari administrasi. Kedua, manajemen dianggap lebih luas daripada administrasi. Ketiga, manajemen dengan administrasi dipandang sebagai konsep identik.

Dalam perspektif Islam, meskipun istilah manajemen tidak disebutkan secara eksplisit pada Al-Qur'an, konsepnya tercermin pada kata *yudabbiru* berarti mengarahkan, melaksanakan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, serta menyusun rencana telah ditetapkan. Kata ini terdapat pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. Yunus (10:31), Q.S. Ar-Ra'd (13:2), dengan Q.S. As-Sajadah (32:5).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, manajemen mampu disimpulkan sebagai suatu tahap terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengawasan, dilakukan menca sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya secara efektif dengan efisien.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1, menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dengan pendidikan menengah harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Hadiyanto (2004:63), MBS pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa tahap pendidikan tidak mampu berjalan optimal jika sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Pendidikan bukanlah sebuah tahap mekanis seperti di pabrik mampu beroperasi secara otomatis setelah program dijalankan. Sebaliknya, pendidikan melibatkan interaksi antara berbagai elemen input serta keterkaitan hasil pendidikan dengan lingkungan sekitarnya.

Secara etimologis, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *manajemen* diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara efektif menca

sasaran; merujuk pada lembaga pendidikan tempat tahap belajar-mengajar berlangsung. Mampu dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya berpusat pada madrasah pada menjalankan tahap pembelajaran.

E. Mulyasa (2007:24) menjelaskan bahwa merupakan bagian dari reformasi pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi pada manajemen memberikan kesempatan bagi madrasah mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Dalam pendekatan, pola pengelolaan pendidikan mengalami pergeseran dari sistem sepenuhnya dikendalikan perlu pemerintah pusat menuju sistem memberikan kewenangan lebih besar kepada madrasah itu sendiri. Nanang Fatah (2003:8) menegaskan bahwa strategi bertujuan merancang ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan kepada kepala madrasah serta meningkatkan partisipasi masyarakat—termasuk guru, siswa, komite madrasah, orang tua, dengan masyarakat—pada upaya meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Sistem ini mengubah mekanisme pengambilan keputusan dengan mendistribusikan kewenangan kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, model pengelolaan pendidikan memberikan madrasah otonomi lebih besar pada pengelolaannya. Pergeseran paradigma ini memungkinkan madrasah lebih mandiri pada mengambil keputusan, memanfaatkan sumber daya internal secara optimal, serta melibatkan seluruh elemen madrasah—termasuk kepala madrasah, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dengan masyarakat—guna meningkatkan mutu pendidikan identik dengan kebijakan pendidikan nasional dengan regulasi berlaku.

Penerapan di berbagai madrasah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap madrasah, sementara pada kenyataannya, madrasah masih menghadapi tantangan pada hal tenaga

pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen. memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi madrasah pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi memungkinkan madrasah menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala madrasah juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer madrasah.

Lebih jauh mendorong kepala dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, madrasah mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat, diperlukan pengelolaan pendidikan menerapkan MBM. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 27, disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi MBM harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas.

Diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian mampu dibangun melalui berbagai strategi, seperti pengembangan unit usaha madrasah, kerja sama dengan pihak eksternal di bidang komersial, serta inisiatif lain mampu meningkatkan pendapatan dengan program pendidikan. Prinsip kemitraan mengacu pada kerja sama antara madrasah dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utama dari kemitraan meningkatkan keterlibatan serta dukungan masyarakat pada bentuk moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan dijalin mampu disesuaikan dengan keperluan dengan kondisi madrasah, dengan memastikan bahwa kerja sama dibangun bersifat saling menguntungkan.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan madrasah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Melakukan perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan. Menurut Ahmad Rozikun dengan Namabuddin (2001:13), kesuksesan MBM memerlukan

waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan:

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa

perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks Bahasa Inggris yang tersedia di madrasah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast berbahasa Inggris. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala madrasah dan wakil kepala madrasah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala madrasah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks madrasah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Kepala madrasah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala madrasah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga

menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris di MTs Nurul Jalal sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran bahasa Inggris di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam bahasa Inggris, baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran bahasa Inggris dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya

adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Sejalan dengan pendapat A. Malik Fadjar (2002:37), keberhasilan bergantung pada dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah daerah, komite madrasah, kepala madrasah, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dengan peserta didik. Pengambilan keputusan secara kolektif di antara para pemangku kepentingan di tingkat madrasah menjadi faktor utama pada implementasi. Manajemen pendidikan diterapkan melalui

MBM bertujuan memberdayakan madrasah sebagai unit pelaksana utama pada tahap pembelajaran. Dengan pendekatan ini, madrasah diharapkan lebih mandiri, inovatif, serta mampu menciptakan iklim kompetitif sehat antar madrasah pada suatu wilayah. Selain itu, madrasah juga memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap para pemangku kepentingan pendidikan, khususnya orang tua dengan masyarakat, pada era otonomi ini turut berperan pada dewan madrasah.

2. Pembelajaran

Pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Merupakan aspek penting pada pengelolaan madrasah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat

peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Bertujuan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Kesuksesan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada mencapai keberhasilan:

Program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi mencapai keberhasilan.

Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap

anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar.

Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Jadi, pengertian pembelajaran menurut para ahli adalah kunci untuk pengembangan pribadi, peningkatan keterampilan, dan kemajuan masyarakat. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. Meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan,

serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama.

Mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional,

sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui

penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan madrasah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan:

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam

pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip

keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan:

Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta

tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks Bahasa Inggris yang tersedia di madrasah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast berbahasa Inggris. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala madrasah dan wakil kepala madrasah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam

pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala madrasah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks madrasah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Kepala madrasah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala madrasah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak

dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris di MTs Nurul Jalal sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran bahasa Inggris di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam bahasa Inggris, baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran bahasa Inggris dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Perlu semua pihak terlibat mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan

serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan madrasah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Kesuksesan memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada mencapai keberhasilan:

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

3. Bahasa Inggris

Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia sudah ada atau terjadi sejak zaman colonial. Bahasa asing adalah istilah yang digunakan pada jaman sekarang. Di Indonesia pada jaman kolonial, bahasa asing (seperti bahasa Belanda sebagai bahasa penjajah, serta bahasa Inggris dan Jerman) telah diajarkan di sekolah-sekolah tertentu, dan diperuntukan bagi mereka berketurunan bangsawan dan anak-anak Belanda. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani

masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi

teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks Bahasa Inggris yang tersedia di madrasah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast berbahasa Inggris. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala madrasah dan wakil kepala madrasah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala madrasah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks madrasah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun keberanian mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Kepala madrasah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala madrasah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris di MTs Nurul Jalal sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran bahasa Inggris di adalah untuk meningkatkan keterampilan

berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam bahasa Inggris, baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran bahasa Inggris dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan

sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan.

Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada

menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

Memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada mencapai keberhasilan pendidikan.

Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. Penerapan Manajemen bertujuan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta

meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi mencapai keberhasilan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci. Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator

dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi,

4. Keterampilan Berbicara

Dalam berkomunikasi, manusia memerlukan bahasa agar informasi tersampaikan dengan tepat dan jelas, apabila salah satu dari pendengar atau pembicara tidak bisa saling memahami bahasa yang disampaikan, maka informasi tersebut tidak akan memiliki makna. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu

menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah.

Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu

memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi

sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

Berkomunikasi pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik itu dua orang, tiga orang, empat orang, maupun secara berkelompok. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

Aspek penting pada pengelolaan madrasah, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

Guru merancang capaian pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum Merdeka, dengan fokus pada peningkatan kelancaran. guru menyampaikan bahwa tantangan dalam pencapaian keterampilan berbicara masih ada, terutama karena minimnya kepercayaan diri siswa dan kurangnya kesempatan praktik berbicara di luar kelas. Dokumen modul ajar

menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai bahan ajar berbasis komunikasi, seperti teks dialog, video interaktif, dan latihan berbicara berbasis situasi nyata. Strategi yang digunakan dalam modul ajar meliputi teknik think-pair-share, role-play, dan storytelling, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam berbicara. Beberapa guru menyatakan bahwa modul ajar masih perlu dikembangkan dengan lebih banyak materi berbasis konteks kehidupan sehari-hari agar lebih menarik bagi siswa.

Guru telah menyusun perangkat ajar yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rubrik penilaian berbicara, dan bahan tambahan seperti flashcards dan audio listening untuk mendukung pembelajaran berbasis lisan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa perangkat ajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun masih ada keterbatasan dalam penggunaan media digital interaktif karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Bahan ajar yang digunakan meliputi buku teks Bahasa Inggris yang tersedia di madrasah, ditambah dengan materi dari sumber online seperti video percakapan, lagu, dan podcast berbahasa Inggris. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi yang terlalu formal, sehingga diperlukan bahan ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Kepala madrasah dan wakil kepala madrasah mendukung pengadaan bahan ajar yang lebih variatif, tetapi menyadari adanya kendala dalam pengadaan sumber daya dan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Kepala madrasah menekankan bahwa CPL yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks madrasah, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku, tetapi masih memerlukan inovasi dalam implementasinya agar lebih efektif. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama dalam membangun

keberanian mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Kepala madrasah berharap ada pelatihan khusus bagi guru agar strategi pembelajaran speaking lebih optimal dan sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Wakil kepala madrasah bidang kurikulum menyatakan bahwa CPL yang disusun sudah menargetkan peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui berbagai strategi, seperti diskusi dan presentasi. Wakamad mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi CPL, terutama dalam keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya media pembelajaran interaktif yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan video atau aplikasi berbasis komunikasi. Wakamad juga menyarankan agar guru lebih aktif dalam memotivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum.

Guru menyampaikan bahwa perencanaan CPL sudah mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang kesulitan berbicara karena kurangnya kosakata dan keberanian. Menurut guru, aktivitas seperti diskusi dan presentasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada tingkat partisipasi siswa. Guru mengungkapkan bahwa beberapa siswa cenderung pasif, sehingga diperlukan metode yang lebih menarik, seperti permainan peran (role-play) atau debat sederhana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu dalam satu sesi pembelajaran, yang menyebabkan latihan berbicara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Guru berharap adanya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa dapat berbicara dalam konteks yang lebih nyata dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Capaian Pembelajaran (CPL) dalam perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris di MTs Nurul Jalal sudah cukup jelas dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kepercayaan diri siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran speaking. Tujuan utama dari pembelajaran bahasa Inggris di adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran difokuskan pada penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari dan situasi nyata. Siswa diharapkan dapat berbicara dengan lancar, percaya diri, dan efektif dalam bahasa Inggris, baik dalam percakapan formal maupun informal.

Pembelajaran bahasa Inggris dirancang untuk membantu siswa mengatasi rasa takut dan malu dalam berbicara bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan pendapat mereka dalam bahasa asing. Selain keterampilan berbicara, tujuan lainnya adalah memperkenalkan siswa pada budaya negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ini membantu siswa memahami konteks penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial dan budaya.

Manajemen pembelajaran yang efektif memerlukan penggunaan metode dan media yang inovatif. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan teknologi, permainan bahasa, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, yang mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterampilan berbicara sebagai salah satu kompetensi inti.

Bertujuan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara

pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-

masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

5. Peserta didik/siswa

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi

pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya.

Madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat. memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial.

Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan.

Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan. Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar.

D. Landasan Kebijakan

Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan. Adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan,

serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan

pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah. di dalamnya bahasa Inggris.

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa kebijakan itu berperan penting dalam rangka untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Secara harfiah istilah "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani "polis" yang merujuk pada negara, kemudian melalui bahasa Latin menjadi "politia" yang juga berarti negara. Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi "policy" yang mengacu pada kebijakan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan madrasah, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap

seluruh pihak terlibat. Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, madrasah perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu madrasah.

Setiap kebijakan dengan keputusan diambil untuk meningkatkan akuntabilitas, madrasah mampu menyusun pedoman pemantauan kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran madrasah pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan meningkatkan keterlibatan warga madrasah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala madrasah, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan madrasah, misalnya pada restrukturisasi madrasah tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial. Dengan diterapkannya kepala madrasah, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan. Kepala madrasah dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan. Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota madrasah. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf madrasah. Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan madrasah, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat.

Dengan demikian, majelis madrasah mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan. Setiap anggota madrasah perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, madrasah mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi madrasah.

Kebijakan pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke madrasah agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing madrasah. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan. Tidak hanya menjadi alternatif pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk kritik terhadap sistem pendidikan selama ini bersifat terpusat. Dalam pengelolaan organisasi, terutama di bidang pendidikan, setiap tindakan dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan visi, kepemimpinan terarah, serta komitmen kuat pada menerapkan dengan menjalankan manajemen pendidikan.

Selain itu, memberikan manfaat bagi operasional berbagai aspek manajemen pendidikan serta mendorong kemandirian madrasah melalui optimalisasi sumber daya dimilikinya, termasuk pemberdayaan guru sebagai aktor utama pada pendidikan. Peran guru penting pada menciptakan lingkungan belajar kondusif, nyaman, fleksibel, dengan menyenangkan. Sebagai tenaga profesional memahami kondisi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya,

guru memiliki tanggung jawab besar pada menca keberhasilan pendidikan. Mereka akan lebih maksimal pada mengaplikasikan kompetensi dengan pengalaman profesionalnya jika diberikan kebebasan serta kepercayaan mengembangkan kreativitasnya pada mengajar. Mendorong madrasah mengembangkan kemandirian, baik pada aspek kepemimpinan, pengembangan institusi, kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, maupun partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan madrasah.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	JURNAL/ TAHUN
1	Fitri Handayani	Analysis of Students' Academic Self-Efficacy on Speaking Class at Twelfth Grade of SMAN 1 Solok on 2020/2021 Academic Year	The results of the research in the dimension of level the total score obtained by students was 75.49% (Good). It means that student had good believe on their ability in speaking class. The total score of dimension of strength obtained was 73.33% (Good). It can be said that most of students had good power to despite many obstacle. The generality dimension of the total score was 72.71%. Based on the above analysis, it can be concluded that students had good Self-efficacy in speaking activities in class with a total score of 73.84%.	2021

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	JURNAL/ TAHUN
2	Imam Suhaimi	ANALYSIS OF SPEAKING SKILLS FOR THE STUDENTS OF SMP AL-IKHLAS KEDIRI	The results showed that the 25 students who were the research subjects, there was only one (1) student who had the ability to master English speaking skills very well and eight (8) students in the good 2 category. This shows that the English speaking ability of students of SMP Al-Ikhlal Kediri is still minima	Jurnal Koulutus 2021
3	Marzuki, Samnia, Ratna	IMPROVING STUDENTS' ENGLISH SPEAKING ABILITY THROUGH FREE STORY METHOD WITH PICTURE CARDS MEDIA	The results showed that in the first cycle, there were 18 students (66.67%) whose speaking ability scores were equal to or above the KKM, and there were nine students (33.33%) whose scores were below the KKM. Because these results do not meet the success criteria that have been set, namely, at least 85% of students have a score equal to or above the KKM, the research continues in the next cycle by first revising some learning steps that are considered not too maximal. The research results in Cycle II showed that there were 26 students (96.30%) whose scores were equal to or above the KKM,	Amanah: Jurnal Amanah Pendidikan dan Pengajaran Volume 2 Nomor 2: 95-105 (2021)

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	JURNAL/ TAHUN
			and there was one student (3.70%) whose scores were still below the KKM. With the achievement of the success targets that have been set, it can be concluded that the use of the Free Story method with picture cards media succeeded in improving the speaking ability of Class IX A students at SMPN 17 Kp. Masaloka Raya.	
4	Sri Rahayu Ratnawati, Issy Yuliasri, Rudi Hartono	ENCHANCINGTHE STUDENTS SPEAKING SKILS USING THREE STEPS INTERVIEW AND NUMBRED HEADS TOGETHER	This study found that (1) TSI and NHT are effective to enhance speaking skill of students with different motivation level, (2) Enhancing speaking skill of the high motivated students using TSI is more effective than using NHT, (3) Enhancing speaking skill using TSI to the low motivated students is more effective than using NHT, (4) There is no interaction between the techniques and studentsâ€™ motivation. This study concluded that TSI and NHT can be used as techniques to enhance the studentsâ€™ speaking skill no	Language Circle. Journal: Language and Literature Vol 12 No 2 (2018)

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	JURNAL/ TAHUN
			matter how studentsâ~ motivational level is.	
5	Dudu Suhandi Saputra	INTERACTIVE LEARNING OF SPEAKING GRADE V ELEMENTARY SCHOOL	Hasil penelitian siklus I, II, dan III. Pada siklus I kemampuan siswa masih rendah, siswa masih malu-malu, takut, dan ragu-ragu dalam memperagakan dialog sederhana secara berpasangan didepan kelas. Nilai rata-rata untuk siklus I adalah 46.97. Pada siklus II kemampuan siswa mulai mengalami peningkatan, terlihat dari hasil nilai rata-rata pada siklus II adalah 65.15. Pada siklus III kemampuan siswa dalam pembelajaran <i>speaking</i> menggunakan <i>interactive learning</i> dengan teknik <i>role playing</i> semakin meningkat, terlihat dari hasil nilai rata-rata pada siklus III adalah 85.23. Hal ini menunjukan bahwa <i>interactive learning</i> dengan menggunakan teknik <i>role playing</i> dapat meningkatkan proses serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran <i>speaking</i> .	Jurnal Cakrawala Pendas Vol. 3 No 1 (2017)
6	Wardah Hanafiah dkk	IMPROVMENT OF SPESKING SKILLS IN	The reserch findings show that: 1) after the second cycle stage, 50%	

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	JURNAL/ TAHUN
		ENGLISH THROUGH ROLE PLAY TECHNIQUE	from 2P students got the minimal standard score of 70, and 53% for 2K students. It means that the research has successfully reached the target, that is: more than 50% of students get the minimal standard score of 70 for speaking skill. 2) Through observation and interview the research findings prove the effectiveness of role play technic gives the positive sides to the students in learning English.	
7	Arum Putri Rahayu	IMPROVEMENT OF STUDENTS SKILLS IN ENGLISH	The results of the study showed that the use of direct methods can improve the English speaking skills of students at the beginner level in the English Center course institute. This can be seen from the results achieved by students at the time of being given the test. The average score of students on the initial test was 30.6% which is categorized as still very lacking. After being given treatment in Cycle I, the average score of students increased to 47.7% and was still in the less category. However, in cycle II the average	Jurnal Paradigma Volume 14, Nomor 1, November 2022

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	JURNAL/ TAHUN
			score of students increased to 71.3% and was in a good category. Students are able to speak in the context of a simple conversation. They are able to use certain phrases and vocabulary effectively.	